

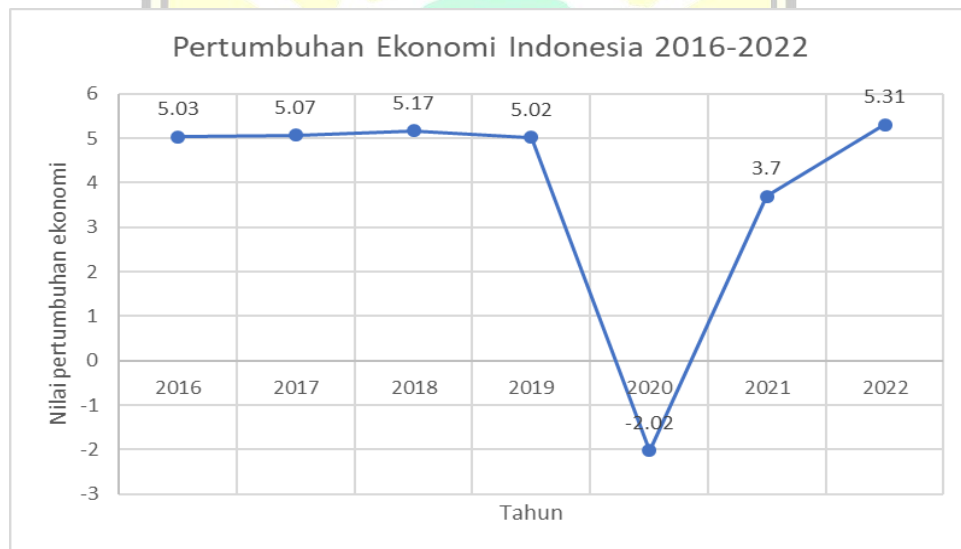
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat mengevaluasi pembangunan ekonomi suatu negara dan efektivitas program pembangunan berikutnya, pertumbuhan ekonomi adalah statistik utama yang harus diperhatikan (Mankiw, 2015). Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan sebagai metrik standar untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara, dengan cara melihat nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu selama periode waktu tertentu (Fatmawati, 2015).

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang fluktuatif.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Sepanjang tahun 2016-2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai lima persen, dengan penurunan yang sangat tajam pada 2020 akibat pandemi *Covid-19*. Perbaikan perekonomian sudah mulai terjadi pada 2021, dan pada tahun 2022 sudah mencapai tingkat 5,31 persen, lebih baik daripada periode 2016-2019. Stabilitas konsumsi masyarakat yang didukung oleh efektivitas kebijakan penanganan pandemi *Covid-19* dan inflasi yang terkendali menjadi kekuatan utama pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kementerian Keuangan, 2023).

Meskipun demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan nasional dan PDB yang tinggi, namun disertai distribusi pendapatan yang tidak merata maka akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan dan pengangguran (Todaro & Smith, 2006). Perkembangan ilmu pengetahuan, menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi melalui pengukuran PDB tidak cukup untuk mengukur perekonomian yang mampu mensejahterakan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang disertai peningkatan ketimpangan pendapatan dalam suatu negara memperlebar jurang antara masyarakat miskin dan kaya, sehingga dapat mendorong masyarakat yang merasa hak hidup layakmya terabaikan untuk melakukan tindakan kriminal (Hidayat, 2020). Oleh sebab itu muncul konsep pertumbuhan inklusif untuk menjabarkan situasi perekonomian yang kompleks.

Konsep pertumbuhan inklusif juga terkait dengan pertumbuhan yang mengangkut partisipasi semua masyarakat. Semua pihak dapat memperoleh manfaat yang sama rata dan berpihak kepada masyarakat miskin atau *pro-poor growth* (Azwar, 2016). Konsep pertumbuhan inklusif mencakup sejumlah elemen termasuk pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pekerjaan, pengembangan sektor-sektor perekonomian, pengurangan ketimpangan regional, perlindungan lingkungan, dan distribusi pendapatan yang adil (Rini & Tambunan, 2021). Diantara elemen-elemen ini pengurangan kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja menjadi fokus utama dalam berbagai studi empiris yang meneliti pertumbuhan ekonomi inklusif, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia terlihat dari target angka kemiskinan yang tidak pernah tercapai pada periode 2020-2022 (Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2024). Target persentase angka kemiskinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2022 selalu berada di atas batas atas target yang ditetapkan atau tidak pernah terealisasi. Angka kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 9,57 persen atau masih relatif lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2022, sebesar 8,5-9,0 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta jiwa. Penduduk yang berada pada kondisi kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 mencapai empat persen atau kurang lebih 6 juta jiwa, yang ternyata

jumlahnya lebih banyak daripada penduduk Singapura tahun 2022 yaitu 5,9 juta jiwa (Kementerian Perekonomian, 2023).

Kondisi kemiskinan di Indonesia tidak terlepas dari situasi ketimpangan pendapatan yang semakin buruk.



Gambar 1.2 Gini Rasio Indonesia 2016-2022

Sumber: BPS (2024)

Target rasio gini tidak pernah tercapai pada periode 2020-2022 dimana Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2022 berada pada rentang 0,376 hingga 0,378. Ketimpangan pendapatan semakin memburuk pada wilayah perkotaan yang mencapai 0,403 pada tahun 2022, dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian rasio gini pada level nasional. Pada tahun 2021, rasio ketimpangan pendapatan di Indonesia berada di level 1 banding 19 yang berarti populasi kelas ekonomi teratas memiliki rata-rata pendapatan 19 kali lipat lebih tinggi dari populasi kelas ekonomi terbawah (*World Inequality Report*, 2022). Rasio ini lebih besar dibanding Amerika Serikat yang memiliki ketimpangan pendapatan sekitar 1 banding 17, ataupun Rusia, Tiongkok, Korea Selatan dan Nigeria yang rasio kesenjangan nya 1 banding 14.

Kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan (2022) melaporkan terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 4,2 juta orang hingga Februari 2022 dibandingkan Februari 2021. Jumlah angkatan kerja tahun 2022 tercatat sebanyak 144,01 juta orang dengan jumlah orang yang bekerja

sebanyak 135,61 orang, dan 8,4 juta lainnya pengangguran (BPS, 2022). Kondisi ketenagakerjaan Indonesia mengalami perbaikan akibat peningkatan lapangan kerja sektor informal tahun 2020-2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, dominasi sektor informal ini harus segera dibenahi jika ingin memperbaiki kualitas ketenagakerjaan di Indonesia.

Pencapaian kondisi ketenagakerjaan yang baik ini harus memperhatikan beberapa fenomena yang berpotensi memperburuk situasi ekonomi. Kondisi yang harus diperhatikan adalah tingginya pekerja tidak penuh waktu (pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam seminggu), yang meliputi setengah menganggur dan pekerja paruh waktu (BPS, 2023). Persentase jumlah orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu pada periode 2020-2022 relatif tinggi, dengan rata-rata di atas 30 persen setiap tahun. *International Labour Organization* (2011) menyebutkan bahwa semakin banyak angkatan kerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu, menjadi indikator proksi pada rendahnya penggunaan tenaga kerja.

Kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kuat. Namun, tingkat ketimpangan, kemiskinan, dan kualitas tenaga kerja yang belum baik mengancam keberlanjutan pola pertumbuhan. Hal ini mencegah sebagian besar manfaat pertumbuhan tersebut menjangkau golongan paling miskin di suatu wilayah (Wright, 2017). Oleh karena itu, pertumbuhan inklusif yang belum bisa tercapai ini harus diperbaiki dengan melibatkan pertumbuhan yang menyediakan pekerjaan yang berkualitas bagi individu yang dimungkinkan melalui modal manusia berupa pendidikan dan pengembangan keterampilan (Oluwadamilola et al., 2018).

Modal manusia menekankan kesetaraan dalam akses ke layanan sosial yang mencakup pendidikan dan kesehatan yang meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Kesehatan dan pendidikan merupakan komponen yang biasa digunakan untuk menunjukkan produktivitas individu (Oluwadamilola et al., 2018; Amodu et al., 2017). Pengembangan modal manusia di sebuah negara adalah prasyarat penting untuk transformasi sosial-ekonomi dan politik negara tersebut (Eigbiremolen et al., 2014). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan

modal manusia sangat penting untuk keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan inklusif.

Selanjutnya, kemajuan dalam bidang pengembangan modal manusia berupa pendidikan membuat kemajuan pada pertumbuhan inklusif. Keberhasilan peningkatan kapasitas modal manusia dicatat dalam partisipasi sekolah yang tinggi (pendidikan primer dan sekunder) (Adeniyi et al., 2020). Akses yang lebih luas dari populasi terhadap pendidikan memberikan kesempatan kepada penduduk untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan produktif.

Kondisi pendidikan Indonesia tahun 2022, pada angka partisipasi sekolah tingkat sekolah dasar mencapai 97,8 persen, tingkat sekolah menengah pertama 80,89 persen dan pada tingkat sekolah menengah atas/ sederajat 61,97 persen (BPS, 2022). Peningkatan angka partisipasi sekolah terus diupayakan pemerintah melalui berbagai program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan program beasiswa kepada peserta didik berprestasi (Kemendikbudristek, 2023). Selain dari kuantitas peserta didik, peran pemerintah dalam mengelola anggaran bidang pendidikan memerlukan analisis yang lebih jauh.

Desain kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan harus mempertimbangkan karakteristik modal manusia dan sangat disarankan perancangan tingkat pajak dan pengeluaran yang paling efisien untuk memberikan “asuransi” terhadap risiko investasi modal manusia (Fleischhauer, 2007). Bovernber & Jacobs (2005) menyatakan subsidi pendidikan yang optimal dapat meningkatkan efisiensi dalam pembentukan modal manusia. Alokasi anggaran pendidikan mengacu pada amanat UUD 1945 pasal 31 ayat(4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) adalah sebesar 20 persen dari APBD. Kementerian Keuangan (2022) menyatakan anggaran pendidikan untuk tahun 2022 terealisasi Rp 472,6 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat Rp 171,5 triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp281,1 triliun dan pembiayaan Rp 20 triliun. Peningkatan anggaran juga dicanangkan pada tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pendidikan dan kesehatan menjadi dua pilar utama yang saling terkait. Kesehatan yang baik adalah pondasi yang diperlukan untuk mendukung perkembangan pendidikan, karena individu yang sehat lebih mampu belajar dan berkontribusi secara optimal. Oleh karena itu, investasi dalam kesehatan masyarakat bukan hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga mendorong kemajuan dalam sektor pendidikan. Umur harapan hidup sering digunakan sebagai indikator untuk mencerminkan kondisi kesehatan yang baik pada suatu wilayah karena sejumlah alasan yang berkaitan dengan akses terhadap layanan kesehatan, kualitas hidup, dan kebijakan kesehatan publik (Smith & Lee, 2016).

Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), umur harapan hidup di Indonesia telah meningkat dari 64 tahun pada tahun 1990-an menjadi lebih dari 73 tahun pada tahun 2022. Namun, masih terdapat variasi yang signifikan antar wilayah, dengan daerah-daerah yang lebih maju secara sosial dan perekonomian umumnya memiliki umur harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang kurang berkembang. Perbaikan akses layanan kesehatan melalui program-program pemerintah dan BPJS kesehatan berkontribusi tinggi atas naiknya umur harapan hidup di Indonesia.

Umur harapan hidup yang tinggi sering kali merupakan hasil dari kebijakan kesehatan publik yang efektif, seperti program vaksinasi, kampanye melawan penyakit menular, dan inisiatif kesehatan ibu dan anak. Kebijakan ini membantu menurunkan angka kematian bayi dan anak, serta mengurangi prevalensi penyakit menular, yang pada akhirnya meningkatkan umur harapan hidup (Marmot, 2015). Kebijakan pemerintah Indonesia tercermin melalui efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah bidang kesehatan yang ditunjukkan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, terutama melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (World Bank, 2020). Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk akses yang tidak merata terhadap pelayanan kesehatan, disparitas ekonomi, dan ancaman kesehatan baru seperti penyakit tidak menular dan pandemi. Namun, dengan upaya terus-menerus dan kebijakan yang tepat, umur harapan hidup di Indonesia diharapkan akan terus meningkat di masa mendatang.

Berdasarkan paparan permasalahan diatas, diduga inklusivitas perekonomian Indonesia masih belum mencapai kategori pertumbuhan inklusif, akibat masih tingginya penduduk miskin, ketimpangan pendapatan yang tinggi, dan kualitas tenaga kerja yang belum baik. Oleh sebab itu, diperlukan kajian mengenai pengaruh modal manusia melalui aspek pendidikan dan kesehatan yang pada berbagai literatur disebutkan akan meningkatkan pertumbuhan inklusif sebuah wilayah. Dengan demikian, diambil judul penelitian **“Pengaruh Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Inklusif di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Gambaran konteks diatas, maka timbul rumusan masalah:

1. Bagaimana kondisi pertumbuhan inklusif di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh umur harapan hidup terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang diuraikan, tujuan dari penelitian adalah:

1. Menganalisis kondisi pertumbuhan inklusif di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia
4. Menganalisis pengaruh umur harapan hidup terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung:

1. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan tempat bagi peneliti untuk mempraktekkan ilmu yang diperoleh selama melakukan penelitian dan mengidentifikasi permasalahan nyata yang ada di masyarakat.

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi pertumbuhan inklusif di Indonesia, dan pengaruh modal manusia berupa pendidikan dan kesehatan terhadap inklusivitas perekonomian Indonesia.

3. Bagi Akademisi dan Ilmu Pengetahuan

Peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi perluasan pengetahuan serta informasi dan bahan referensi untuk pengembangan kebijakan dan penelitian di masa depan terkait dengan pertumbuhan inklusif dan modal manusia.

